



La Via Campesina di Indonesia: petani kecil, kedaulatan pangan dan kesetaraan gender di Jawa Tengah

Desember 2013



Karina Bontes Forward

Pembimbing: Elisabeth Dewi, PhD

**Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies (ACICIS)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Katolik Parahyangan
Bandung, Indonesia**

Halaman Pengesahan

Judul: La Via Campesina di Indonesia: petani kecil, kedaulatan pangan dan kesetaraan gender di Jawa Tengah.

.....
Karina Paloma Bontes Forward

Penulis

.....
Mengadar Situmorang

Direktor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

.....
Elisabeth Dewi, PhD

Pembimbing

.....
Elena Williams

Resident Director, Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies (ACICIS)

Abstrak

La Via Campesina (LVC, or the Peasants' Way) offers an alternative to the dominant paradigm of food production today. Instead of focus on streamlined international trade and increased crop production, LVC promotes food sovereignty, a self-coined term which denotes the right of peoples to define their food production and trade systems. It encompasses various themes, including sustainable peasant agriculture, fair markets, rights for migrant workers, biodiversity and genetic resources, agrarian reform, and gender equality. The Indonesian member organisation, Serikat Petani Indonesia (SPI, or Indonesian Peasants Union) has been affiliated since the end of the New Order in 1998, and has come to be a strong presence in Indonesian agriculture as well as on the world stage. The differentiated experiences of men and women farmers and the need for equal representation is a part of La Via Campesina's food sovereignty discourse, and how gender equality and indeed food sovereignty play out on the ground is largely dependent on how member organisations organise themselves and what they prioritise. At the national level, SPI have implemented an equal representation plan and have a women's department, but still have under-representation, largely because of the roles women play in Indonesian society. This research aims to explore what impacts women farmers have experienced from industrial, trade-led agricultural production, what SPI is doing to combat that and integrate it into the food sovereignty struggle in Indonesia, and what this means in terms of equal representation. The third-largest province in Indonesia, Central Java, was the study area for this research. It was found that there have been wide-ranging impacts from liberalisation and industrialisation of food trade and production, and the gendered impacts of these are visible on different levels, including health, food processing and farming traditions, eating patterns, and division of labour. These gendered issues cannot be addressed meaningfully without equal representation within SPI, and although there have been strong efforts to implement equal representation the reality is quite different and far from targets.

La Via Campesina (LVC atau Jalan Petani) menawarkan alternatif dari paradigma dominan dalam penghasilan pangan kini. Malah perdagangan internasional yang dialihkan dan peningkatan hasil pangan, LVC mempromosikan kedaulatan pangan, istilah diciptakan sendiri yang berarti orang yang menghasilkan pangan memiliki hak atas sistem penghasilan dan perdagangan pangan. Termasuk berbagai tema, seperti pertanian keberlanjutan, pasar adil, hak untuk pekerja migran, keanekaragaman hayati dan sumber genetik, pembaharuan agraria dan kesetaraan gender. Organisasi anggota Indonesia, Serikat Petani Indonesia (SPI) sudah menggabungkan diri sejak selesainya Orde Baru pada tahun 1998, dan dari tanggal itu sudah menjadi hadapan yang kuat di bidang pertanian Indonesia serta panggung internasional. Pengalaman yang berbeda antara petani perempuan dan laki-laki dan keperluan untuk keterwakilan setara merupakan sebagian wacana kedaulatan pangan. Keberhasilan dalam hal tersebut ini tergantung pada berapa baik pengurusan organisasi anggota dan prioritas mereka. Pada tingkat nasional, SPI sudah melaksanakan rencana keterwakilan setara dan ada departemen perempuan, tetapi tetap keterwakilan kurang perempuan, sebagian besar karena peranan perempuan dalam masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan menyelidiki dampak dialami perempuan petani dari pertanian industrial, apa yang dilakukan SPI untuk melawan dampak ini, dan menjelaskan akibatnya untuk keterwakilan setara. Propinsi paling besar ketiga di Indonesia, Jawa Tengah, dipilih sebagai daerah penelitian. Ditemukan bahwa ada dampak luas dari liberalisasi dan industrialisasi penghasilan dan perdagangan pangan, dan bahwa ada dampak yang terkait dengan gender pada tingkat berbeda, termasuk kesehatan, proses pangan, adat pertanian, pola makan dan pembagian kerja. Persoalan tersebut tidak bisa ditangani sepenuhnya tanpa keterwakilan setara dalam SPI, dan walaupun sudah ada upaya kuat dengan pelaksanaan keterwakilan setara, kebenaran masih jauh dari keinginan.

Kata Pengantar

Adalah beberapa pihak yang membantu dengan pekerjaan penelitian ini. Yang pertama, semua karyawan di ACICIS yang menjawab semua pertanyaan saya, khususnya Liam Prince di Perth, Elena Williams di Yogya dan Dyah Pandam Mitayani di Bandung/Jakarta. Saya sangat senang bisa kenal orang yang bersemangat begitu pekerjaannya. Pembimbing saya, Mbak Nophie, adalah pendukung yang kuat dan selalu tertawa, dan merasakan saya kurang stres. Pendamping saya, Doni Marmer, banyak bantu saya dengan pertemanannya serta bantuan dengan perkenalan dengan Melani Sunito. Melani Sunito dan suaminya Mas Satyawan, yang membantu saya jauh lebih banyak daripada yang diminta dan walaupun bukan pembimbing saya, saya diperlakukan seperti mahasiswanya. Universitas saya, ANU, untuk semua bantuan administratif dan keuangan, dan untuk kesempatan yang diberi kepada mahasiswa pelajaran Asia. Ibu Ida, Mbak Chris, Ayu dan semua karyawan lain di kantor internasional dan rektorat yang selalu ramah dan senang menawar teh dan kueh waktu masuk kantor. Kepada semua orang yang diwawancarai yang sabar dengan kesalahan bahasa saya, yang memberi informasi atas pengalaman mereka secara jujur dan lengkap. Dan yang paling akhir tetapi salah satu yang paling penting, semua teman di Froghouse, tempat tinggal saya di Yogyakarta pada bulan terakhir dalam penulisan skripsi, yang memasak, membantu, antar saya ke mana-mana, nongkrong, ketawa dan menyantakan saya dalam beberapa minggu terakhir di mana saya kurang tidur, terima kasih.

Daftar Isi

Halaman Pengesahan	2
Abstrak	3
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
1. Pendahuluan	6
2. Latar belakang masalah	8
2.1 Keadaan pangan di dunia	8
2.2 La Via Campesina (LVC)	9
2.3 Serikat Petani Indonesia (SPI)	11
2.4 Pangan di Indonesia	12
2.5 Pertanyaan penelitian dan pembatasan penelitian	13
3. Kerangka teori	15
3.1 Ekologi politik feminis (EPF)	15
3.2 Identifikasi masalah	16
4. Pengetahuan, pangan dan perempuan petani di Indonesia dan Jateng	17
4.1 Sejarah peranan perempuan petani	17
4.2 Pengaruh dari pertanian neoliberal dan liberalisasi perdagangan terhadap perubahan peranan perempuan dan laki-laki	19
4.3 Pembagian kerja dan buruh	22
4.4 Perubahan pola hidup	23
4.5 Pengaruh SPI	25
5. Organisasi dan perempuan petani	28
5.1 LVC, patriarki dan keadilan gender	28
5.2 SPI: antara global dan akar rumput	29
6. Kedaulatan pangan dan pengaruh LVC	32
6.1 Keadaan kedaulatan pangan	32
6.2 Kedaulatan perempuan	33
6.3 Tantangan LVC dan SPI pada masa depan	35
7. Penutup	37
8. Catatan tambahan	38
9. Acuan pustaka	39

1. Pendahuluan

Semua kita makan. Pangan itu pusat masyarakat sepanjang masa, dan karena pengembangan pertanian manusia bisa maju. Setiap daerah dunia ini mengembangkan pangan berdasarkan iklim, tempat, tanaman, dan ketersediaan sumber daya alam, yang membentuk adat pangan. Menurut La Via Campesina (LVC, yang artinya ‘Jalan Petani’), suatu gerakan sosial antarbangsa, pangan adalah hak asasi manusia dan semua suku ada hak atas pembentukan kebijakan pangan dan agraria mereka, supaya sumber pangan sehat dan ajek serta kesejahteraan masyarakat pedesaan dapat dijamin (La Via Campesina 2000). Ini dinamakan kedaulatan pangan oleh LVC, dan berarti kemampuan meneruskan praktek pertanian yang pantas secara budaya dan sosial di setiap negara. Salah satu hal yang juga termasuk dalam wacana kedaulatan pangan adalah keterwakilan dan keterlibatan kaum perempuan petani, dan ini dicerminkan dalam tindakan organisasi itu. LVC didirikan karena sistem pertanian, antara lain, banyak berubah dalam seratus tahun terakhir, dan perubahan ini ada banyak akibat buruk yang sangat mempengaruhi sistem pertanian adat dan hubungan masyarakat dengan pangannya. Sejak akhirnya Perang Dunia II, perubahan tersebut mengharuskan kekuasaan pangan, yaitu dari petani kecil ke organisasi dan perusahaan semakin besar. Ini diperbolehkan berbagai hal, termasuk kemajuan teknologi, komunikasi, kesepakatan antara pemerintah dan pendirian badan internasional yang terkait dengan perdagangan.

Indonesia adalah suatu negara dengan kekayaan sumber daya alam, dan ada adat pangan yang sangat berbeda di seluruh kepulauan. Juga negara yang ikut serta sistem perdagangan global ini sejak awal, dan akibatnya luas dan mendalam dengan dampak sosial dan terhadap lingkungan hidup. LVC ada keberadaan kuat di Indonesia sejak tahun 1998, dan anggota lokalnya, SPI, berjuang di bidang pertanian dan sosial. Salah satu sektor masyarakat yang merugikan dalam bidang pertanian, tetapi juga pada akhirnya, adalah kaum perempuan. Pada tingkat internasional itu laki-laki yang berdominasi organisasi pedesaan (Desmarais 2004:140). Di Indonesia, peranan perempuan cenderung ke peranan sebagai istri, ibu rumah tangga, penyedia, pendidik dan warga negara yang baik (Armstrong 1994:135). Perempuan petani menghadapi kerugian ganda karena tergolong dua kelompok masyarakat yang terpinggir, yaitu petani dan perempuan.

Penelitian ini akan menyelidiki persoalan kesetaraan gender dalam konteks perempuan petani. Tujuan sini adalah untuk lihat kalau pengaruh dari LVC, yang ada peraturan yang kuat dan nyata

tentang perempuan pada tingkat nasional, menerjemahkan ke tingkat lokal. Daerah fokusnya Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah (Jateng) pada khususnya. Dilakukan melalui kerangka teori ekologi politik feminis (EPF), yang merupakan teori yang berguna untuk menghubungkan wacana internasional dengan tindakan lokal. Ada diskusi tentang peranan perempuan, perubahan budaya, pembagian kerja, perempuan dalam organisasi dan perempuan kedaulatan pangan, dan teratur menurut kerangka EPF tersebut.

Penelitian ini dibagi lima. Bagian berikutnya adalah penjelasan konteks latar belakang pangan di dunia, LVC dan SPI. Setelah itu ada pengantar kerangka teori EPF, dan termasuk penggunaan EPF dalam sastra dan penyelidikan sastra lain sekitar perempuan, pangan, Indonesia, LVC dan SPI. Ini dilanjutkan sejarah pangan dan perempuan di Indonesia dan khususnya di Jateng, daerah fokus penelitian ini. Lalu ada pergeseran ke keterwakilan perempuan di LVC, SPI dan di Indonesia pada umumnya. Yang terakhir adalah diskusi tentang kedaulatan pangan dengan konteks perempuan di organisasi LVC/SPI, yang mengumpulkan buah bibir dari bagian-bagian sebelumnya. Untuk selesai ada rekomendasi penelitian lebih lanjut, karena topik sebesar LVC dan gerakan kedaulatan pangan di Indonesia, belum ada banyak ditulis dan penelitian ini kecil saja, di daerah di mana seharusnya jauh lebih banyak sastra atas topik yang sangat penting.

2. Latar belakang masalah

2.1 Keadaan pangan di dunia

Pasar pangan adalah pasar terbesar di dunia. Sepanjang sejarah manusia sejak pertanian mulai sekitar 10,000 tahun lalu, pangan adalah pusat kehidupan masyarakat biasa. Hal ini hanya mulai berubah dalam beberapa dekade terakhir, ketika hubungan internasional menjadi lebih luas dan lebih cepat karena telekomunikasi dan transportasi menjadi lebih maju. Ilmu pasti dan teknologi juga maju dan mulai menyelidiki cara untuk meningkatkan jumlah hasil pangan global, karena jumlah penduduk dunia dalam seratus tahun terakhir meningkat semakin cepat. Pada saat bersama, muncul aliran pemikiran umum pada tingkat global yang mengatakan bahwa tingkat produksi pangan harus dinaikkan 70% untuk memberi makanan kepada sembilan milyar penduduk yang akan menghuni bumi pada tahun 2050 (FAO, 2009). Tingkat kemiskinan global sudah besar sekali, dengan lebih daripada semilyar orang yang makanannya tidak cukup. Ini dianggap sebagai krisis keamanan pangan, istilah yang ada artinya dalam kecukupan pangan untuk manusia.

Cara melawan krisis ini kini adalah melalui pertanian neoliberal, yang diciptakan setelah Perang Dunia Kedua dan berdasar di model produksi industrial, khususnya dengan model 'Revolusi Hijau'. Pertanian neoliberal mengikuti bahan dasar perekonomian neoliberal, dan bertujuan meningkatkan hasil panen dan keuntungan dari panen pokok tertentu, seperti beras, jagung, dan kedelai (Menser 2008:28). Model ini mencapai memenuhi tujuan tersebut dan sejak 1960 sudah mengurangi secara drastis penyertaan tenaga kerja manusia dan hewan dalam pertanian. Tenaga kerja ini merupakan dasar pertanian kecil sepanjang masa sampai teknologi Revolusi Hijau mengubah itu. Perubahan ini dicepatkan intensifikasi panen untuk ekspor dan peningkatan perdagangan global. Negara-negara mulai tergantung pada pangan yang diimpor karena kesepakatan dibuat untuk perdagangan pangan bebas (Free Trade Agreement - FTA), biasanya dengan negara yang berkuasa industri itu seperti Amerika Serikat (Menser 2008:29).

Walaupun sistem ini meningkatkan hasil pangan dunia secara besar, ada kritik dari berbagai sisi tentang dampak ke lingkungan hidup, politik, perekonomian dan masalah sosial, yang lebih mempengaruhi kaum miskin pedesaan tetapi tidak terbatas dengan mereka (Martínez-Torres & Rosset 2012:17). Kaum miskin di daerah pedesaan terpengaruh secara buruk sekali dari proses-

proses tersebut. Privatisasi disebabkan perusahaan yang berkuasa perdagangan sudah membatasi akses tanah dan sumber daya alam kaum miskin pedesaan dan kekuasaan perdagangan global menelanjangi banyak orang, termasuk petani kecil, ke sifat berubah-ubah pasar internasional (Borras 2010:772).

Selain itu, sistemnya didasarkan paradigma berbeda. Pertanian petani kecil mengikuti lingkaran produksi yang pendek dan terdesentralisasi, dengan hubungan kuat antara penghasilan pangan dan ekosistem dan masyarakat lokal. Sebaliknya, pertanian neoliberal mengikuti pola dipusatkan perusahaan, dengan penghasilan yang tidak terhubung dengan suasana sosial atau alami lokal (Martínez-Torres & Rosset 2012:23). Itu petani kecil yang sudah memberi makanan kepada seluruh dunia selama hampir sepanjang masa, tetapi pertanian ini meminggirkan mereka. Dewasa ini, walaupun perusahaan besar menguasai semakin banyak lahan subur di dunia, sekitar 70% pangan untuk manusia tetap dihasilkan petani kecil (La Via Campesina, 2012:61).

2.2 La Via Campesina

Namun demikian, pengembangan tersebut tidak setuju semua pihak yang terlibat. Salah satu kelompok yang banyak dirugikan adalah para petani kecil. Marx meramalkan bahwa petani kecil akan terbenam dengan pertanian kapitalis, dan penguasa globalisasi neoliberal mengharapkan mereka dikalah pertanian besar dan industrial (Desmarais 2008:139). Malah hilang, banyak petani kecil di dunia berkeras kepala dan menolak paradigma pertanian neoliberal. Memang, ada gerakan yang mewakili jalan alternatif perubahan pasar dan pengaliran pangan ini, baik di tingkat negara maupun di tingkat internasional. LVC adalah sebuah organisasi internasional petani kecil dan pekerja pedesaan, yang berpandangan berbeda dengan tujuan sistem pertanian neoliberal; pangan di dunia sudah cukup untuk memberi makanan kepada seluruh dunia, masalahnya berada pada ketidaksetaraan pasar dan kekurangan hak-hak petani. Pandangan ini bertentangan dengan sistem penghasilan kapitalisme dan neoliberalisme, yang buah dari aliran-aliran itu (Borras, 2008:261). LVC dianggap banyak pihak sebagai gerakan sosial yang paling penting di dunia (Martínez-Torres & Rosset 2010:150). LVC terdiri dari lebih dari 130 organisasi di lebih dari 60 negara dan mewakili puluhan juta petani, pekerja pedesaan, petani tanpa tanah, nelayan, laki-laki dan perempuan, bersama dalam wacana yang melawan sistem yang menghargai perekonomian dan keuntungan keuangan lebih dari suasana sosial dan lingkungan (Menser 2008:21).

Didirikan pada awal tahun 1990-an di Amerika Selatan, LVC sudah menjadi salah satu suara terkuat di dunia yang mewakili sisi lain. Perjuangan utamanya terkait dengan kedaulatan pangan—istilah diciptakan mereka sendiri—untuk mengambil kembali hak-hak petani kecil untuk ambil keputusan atas pangan dan tanah, menyediakan pangan yang sehat dan tidak merusak lingkungan, dan memberi jalur untuk penduduk pedesaan hidup bermartabat secara ekonomi, sosial dan budaya (La Via Campesina 2012:11). Ini cara yang sangat beda dari sistem neoliberal untuk memastikan masa depan untuk sumber pangan dunia. Tujuan ingin dicapai LVC melalui wacana diciptakan petani kecil di dunia, dengan tujuh pilar utama yang membimbing gerakannya, termasuk:

- kedaulatan pangan dan liberalisasi perdagangan;
- keanekaragaman hayati dan sumber genetik;
- pembaruan agraria;
- kesetaraan gender;
- pertanian keberlanjutan berdasarkan petani kecil;
- hak asasi manusia; dan
- pekerja imigrasi dan pertanian.

Tujuh pilar ini tergabung secara bebas di bawah nama kedaulatan pangan, dan itu diakui bahwa kedaulatan pangan tidak bisa dicapai tanpa ketermasukannya secara rata. Kedaulatan pangan terdiri atas banyak hal. Konsep kedaulatan pangan tidak berarti perdagangan internasional dilarang; malah, orang yang menghasilkan pangan seharusnya lebih berkuasa terhadap perdagangan, metode pertanian dan tujuan penghasilan. Keanekaragaman budaya, petani dan panen adalah landasan sistem yang lebih setara dan kurang peka terhadap gerakan pasar internasional, menurut LVC. Sebagai metode pertanian yang beranekaragam, pertanian keberlanjutan juga bertentangan dengan pertanian neoliberal. Dalam perjuangan pangan, kegunaan metode-metode pertanian yang berkelanjutan semakin banyak; di Indonesia, ini berarti ambil kembali cara tanam dari zaman dulu. LVC menggunakan suatu istilah untuk pertanian berkelanjutan, yaitu *agroekologi*. Akan tetapi, agroekologi bukan metode pertanian berkelanjutan biasa. Hal tersebut adalah metode pertanian, yang bertujuan sesuai dengan prinsip-prinsip alam, termasuk menolak pemakaian kimia agraria; juga ada yang mengatakan itu seperti ilmu pasti yang menjelaskan sistem agraria dan ekologi; tetapi, di dalam istilah LVC itu, termasuk unsur-unsur politik, sosial dan kebudayaan, dan terkait dengan konsep kedaulatan pangan, yang salah satu pilar LVC (Rosset & Martínez-Torres 2012:17).

LVC menganjurkan bahwa pelaku utama rezim pangan dunia adalah WTO (World Trade Organisation - Organisasi Perdagangan Dunia). WTO adalah organisasi terdiri dari 159 negara anggota, yaitu lebih dari 80% semua negara di dunia (WTO 2013). Secara resmi, negara anggota WTO adalah yang menjuruskan tindakan organisasi itu, dan merupakan kebijakannya. Sebagai organisasi massa internasional, LVC tidak ada akses resmi ke WTO, sehingga tergantung pada seberapa jauh organisasi anggotanya bisa merundingkan dengan pemerintah negaranya (Burmeister & Choi 2012:247).

2.3 Serikat Petani Indonesia (SPI)

Serikat Petani Indonesia (SPI) adalah organisasi Indonesia yang sudah lama anggota LVC. Sebelum tahun 1998, organisasi petani (atau organisasi apapun) tidak diizinkan didirikan selain yang diurus pemerintah, yaitu HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan), keduanya berbasis pertanian neoliberal. LVC berdiri pada tahun 1993, jadi selama lima tahun itu sebelum akhirnya Orde Baru, hanya ada hubungan yang ramah antara beberapa organisasi kecil di Indonesia dan LVC. Ini paling kuat di Sumatra Utara dengan SPSU (Serikat Petani Sumatra Utara): pada tahun 2007, 8 dari 11 organisasi anggota FSPI adalah di Sumatra. Oleh karena itu waktu FSPI didirikan di Indonesia pada tahun 1998, kantor utamanya berada di Sumatra Utara. FSPI didirikan oleh sekelompok petani pejuang setelah penindasan Orde Baru kepada penyuaran permasalahan hak-hak petani di Indonesia, seperti pembaruan agraria, perebutan tanah dan lain-lain (Purwanti, 2013:2).

Selama beberapa tahun pertama keberadaannya LVC, pengaruhnya lebih cenderung ke kebudayaan dan persoalan petani di Amerika Selatan daripada pengalaman Asia atau Afrika. Hal ini akibatnya kekurangan kemandirian daerah-daerah anggota, karena kebersamaan negara dikurangi oleh ketidakadaan organisasi daerah untuk menyelaraskan minat-minatnya (Desmarais, 2008:143). Pada tahun 2000 pemimpin FSPI, Henry Saragih, menjadi koordinator Asia Tenggara LVC, dan pada tahun 2003, dia dipilih sebagai koordinator global LVC. Pada tahun 2004 Indonesia menjadi tuan rumah kantor utama internasional LVC, jadi kantor utama SPI dipindahkan ke Jakarta. Kantor utama LVC dipindahkan supaya bisa menguatkan gerakan di berbagai daerah, dan berada di Jakarta selama sembilan tahun sampai 2013, pertama kalinya berada di benua Asia.

Tantangan LVC adalah mengubah wacana internasional ke aksi nasional dan lokal, dan memang suksesnya gerakan internasional tergantung pada itu (Desmarais 2008:138). Dalam katanya Tarrow

dan McAdam (2005), ada ‘pergeseran skala’ yang berada dalam gerakan antarbangsa, yaitu pemindahan idaman dan isu dari tingkat lokal dan nasional ke blantika internasional. LVC menciptakan tujuannya berdasar dalam keperluan anggotanya, dan pada baliknya, SPI ambil idaman dari LVC juga untuk memadukan di idaman mereka. Anggota gerakan antarbangsa tidak menghapuskan atau menggantikan idaman mereka ketika mereka menjadi anggota, tapi mengubah idaman itu ke dalam konteks negara mereka (Tarrow dan McAdam 2005:123).

Dalam konteks LVC, ini juga suatu hal yang terkait dengan perbuatan; LVC memberi kerangka, sumber inspirasi, jejaringan, ruangan diskusi dan pertukaran ide, dukungan dan ketampilan kepada anggotanya, tetapi pelaksanaan di tingkat negara dikerjakan oleh anggota. Peranan LVC adalah untuk mefasilitasi, menyebar pengetahuan dan membentuk gagasan, serta mendukung perjuangan di setiap negara anggota. Kebanyakan petani di dunia tinggal di benua Asia; pemindahan kantor utama LVC ke Asia masuk akal, dan juga karena fokusnya sampai itu lebih ke arah Amerika Selatan. Dapat dipastikan pengaruhnya di benua Asia semakin kuat dan luas sekarang setelah sembilan tahun di sana, khususnya di Indonesia. SPI, sebagai anggota Indonesia LVC dan tuan rumah selama beberapa tahun itu, mempunyai tantangan atas menjalankan misi petani global tersebut supaya sesuai dengan keadaan, kebudayaan dan persoalan Indonesia sendiri. Memang, sukses dan kekuatan LVC tergantung pada kemampuan anggotanya dalam permainan politik di negara mereka sendiri (Burmeister & Choi 2012:247).

2.4 Pangan di Indonesia

Indonesia adalah negara agraria. 70% dari 240 juta penduduk tinggal di daerah pedesaan (Lubis dan Polong 2013:109). Masalah terutama yang dihadapi petani di Indonesia mencerminkan masalah yang berada di banyak negara berkembang yang mengikuti pengembangan agraria menurut kebijakan WTO. Indonesia menjadi anggota WTO pada tahun 1994, salah satu negara yang pertama bergabung (Lubis dan Polong 2013:110). Pengalaman Indonesia sangat dipengaruhi pasar perdagangan internasional tersebut sejak zaman Orde Baru, dengan pembaruan agraria dan pemakaian kimia, tetapi juga penyebaran pendidikan di daerah pedesaan (Fuglie, 2010:225). Sebagai akibat langsung dari kemajuan teknologi di dunia barat, khususnya Amerika Serikat, mulai pengaruh yang kuat dari Revolusi Hijau di pertanian Indonesia sejak tahun 1960an, terutama melalui kebijakan Panca Usaha Tani. Pendekatan Revolusi Hijau berfokus ke benih hibrida, pemakaian kimia dan pestisida dan irigasi yang teratur untuk meningkatkan hasil pertanian.

Pemimpin rezim Orde Baru, Suharto, melaksanakan program tersebut untuk meningkatkan jumlah pangan untuk mencapai swasembada beras dan kedelai, dan disebarluaskan secara luas oleh subsidi pupuk yang dianggap sebagai tulang punggung kebijakan pertanian zaman itu (Susila 2010:43). Penghasilan panen ditingkatkan secara drastis pada awal Revolusi Hijau di Indonesia, tetapi pada awal 1990an sudah mulai menyamakan, yang pola biasa dengan pertanian yang memakai kimia karena keturunan kesuburan tanah itu sendiri. Ini bertepatan

Pada tahun 1998, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund - IMF) menekan pemerintah Indonesia melaksanakan Program Penyesuaian Kebijakan (Structural Adjustment Program - SAP) (Lubis dan Polong 2013:110). Prinsip utama SAP ini adalah privatisasi, liberalisasi perdagangan dan reformasi pemerintah. Pada waktu Krisis Moneter pada tahun 1997-98, IMF lagi memberikan bantuan kepada Indonesia, tetapi ada persyaratan: harus membuka ekonomi agraria untuk menerima perminatan asing dan bersaing di pasar internasional. Ini dilakukan melalui Surat Kehendak (Letter of Intent - LOI), dan memaksa reformasi yang sangat luas di sistem perdagangan dan pemerintahan pangan (Lubis dan Polong 2013:110).

Memang, pola ini masih berada, satu-satunya hal yang berubah adalah ukuran perusahaan, pengaruh dari luar dan budaya pangan. Pertanian neoliberal tetap paradigma utama: pada tahun 2009, subsidi pupuk kimia merupakan 30% jumlah anggaran pertanian nasional, jumlahnya 16 trilyun IDR. Juga sesuatu yang berubah adalah pengaruh dari banyak organisasi petani dan keadilan sosial, yang tidak diizinkan pada zaman Orba. Sekarang dengan kebebasan pengurusan diri, sudah ada gerakan sosial untuk pertanian yang adil dan untuk masyarakat, dan pengaruh LVC adalah satu inspirasi untuk gerakan ini, setidaknya karena anggotanya, SPI, tetapi karena sebagai gerakan sosial mau mempengaruhi dan memasukkan kelompok manapun yang juga melawan sistem yang memilih keuntungan malah kehidupan.

2.5 Pembatasan dan pertanyaan penelitian

Penelitian ini akan menyelidiki bagaimana keberadaan kantor pusat internasional LVC di Indonesia telah mempengaruhi peranan petani perempuan dalam gerakan kedaulatan pangan, dengan Jateng sebagai daerah fokus.

Ada perbatasan yang dibuat beberapa hal. Yang pertama, secara geografis. Indonesia adalah negara kepulauan paling besar di dunia, dan jumlah penduduknya adalah sekitar 240 juta. Perbedaan budaya, fokus perjuangan petani dan adat perempuan juga merupakan suasana ganjil untuk penelitian, jadi satu daerah fokus di mana keadaan lebih rata diperlukan untuk memberi contoh yang baik. Jateng adalah fokus penelitian ini, suatu propinsi di tengah pulau Jawa yang merupayakan satu seperempat seluruh daerah Jawa, 39,800km². Jumlah penduduk propinsi adalah sekitar 30.5 juta, propinsi ketiga paling besar di Indonesia. Itu juga daerah yang menghasilkan banyak pangan karena tanah suburnya dari aktivitas gunung api, dan petani Jateng merupakan bagian lumayan besar penhasil pangan Indonesia.

Adalah berbagai masalah yang berada dalam perjuangan petani Indonesia, dan ini berbeda setiap daerah. Masalah yang difokuskan di Jateng dan di Indonesia diputuskan dari tiga hal: yang pertama, kaum perempuan. Ini karena perbedaan antara pengalaman perempuan dan laki-laki petani masih perlu diselidiki, dan karena LVC ada tujuan kesetaraan gender, jadi penelitian yang lihat bagaimana pengaruhnya di akar rumput penting. Yang kedua, masalah utama yang muncul dari orang yang diwawancarai. Mereka tahu apa persoalan yang paling besar di daerah mereka, jadi yang pendapat mereka menjadi basis penghasilan. Yang ketiga adalah aliran yang ada di dalam kerangka teori terpilih, yaitu keterwakilan perempuan di organisasi dan *gendered knowledge and science*, yang akan dijelaskan secara lebih lengkap dalam bagian berikutnya.

3. Kerangka Teori

3.1 Ekologi politik feminis (EPF)

Ekologi politik adalah bidang pelajaran suasana sosial, ekonomi dan politik dalam konteks lingkungan. Ekologi politik berbeda dengan pelajaran ekologi biasa karena memperpolitikkan persoalan lingkungan. Ini dilakukan dengan fokus tertentu ke pengaruh skala geografis, yang semakin penting dalam dunia diglobalisasi dan dimodernisasi kini (Zimmerer & Basset 2003:2). Pengaruh dari tindakan politik internasional bisa tersentuh di akar rumput, dan semakin banyak tindakan dari akar rumput bisa tersentuh di tingkat internasional, kebanyakan karena keberadaan internet yang membolehkan orang biasa saling hubungi dari jangka jauh. Pengaruh dari tindakan internasional termasuk perubahan sosial dari kekuasaan internasional, degradasi lingkungan, marjinalisasi, pelestarian lingkungan, dan identitas lingkungan masyarakat, antara lain. Pengaruh paling besar dari tindakan lokal adalah gerakan sosial.

EPF berusaha memadukan aliran ekologi politik dan feminis untuk memberi pandangan yang lebih terpadu kepada keserjanaan paham lingkungan. Dunia akademis dalam beberapa dekade terakhir mulai memperhatikan pemikiran feminis dan memadukan pandangan sensitif gender di dalam sastra, termasuk di Indonesia. Aliran utama pengembangan menyusulkan bahwa industrialisasi dan globalisasi neoliberal bisa meningkatkan keadaan hidup perempuan (lihat, misalkan, Wolf 1988). Tambahan pula, di Indonesia dan banyak negara yang berkembang itu benar: dengan industrialisasi juga datang kesempatan lebih banyak untuk pekerjaan yang menguntungkan, khususnya sebagai buruh. Meskipun demikian, ini meremehkan berbagai cara orang menghubungkan dengan sistem dan hak-hak perorangan untuk memilih gaya hidup. Ini sangat benar untuk perempuan pedesaan di Indonesia, di mana pembesaran ekonomi dan pembangunan masyarakat didasarkan konsep-konsep neoliberal, yang menyokong kekuasaan pasar dan peminatan luar negeri. Ini tepat sekali lagi di bidang pertanian, dan tantangan yang dihadapi perempuan petani.

EPF berusaha mengerti dan menerjemahkan pengalaman lokal dalam konteks proses perubahan ekonomik dan paham lingkungan secara internasional (Rocheleau *et al.*, 1996:4). Kebanyakan sastra ekologi politik berfokus kepada daerah pedesaan di Selatan global, walaupun ada penyebaran lebih luas yang diselidiki juga (Zimmerer & Basset 2003:1). EPF ada fokus tertentu untuk

menyimpang dari kebiasaan membedakan antara perkotaan dan pedesaan dan Utara dan Selatan global, tindakan yang menerangi fakta bahwa masalah dengan lingkungan dan politiknya tidak berada di daerah pedesaan saja, tetapi dialami di perkotaan juga, lagi pula di Utara global. Padahal, penelitian ini didasarkan pengalaman perempuan pedesaan karena itu di mana ada petani perempuan di Indonesia. Ada persoalan migrasi yang dapat dimasukkan dengan pendekatan tersebut. Ekologi politik sudah suatu kerangka yang termasuk berbagai cara mendekati suatu masalah, dan EPK tambah rumit kepada kerangka ini karena juga memiliki beberapa cara menterjemahkan persoalan yang diselidiki. Hal ini berarti harus memilih cara penggunaan kerangka ini, yang paling tepat untuk persoalan perempuan petani di Indonesia dan pengaruh LVC.

3.2 Identifikasi masalah dan penggunaan kerangka teori

EPF bisa digunakan berbagai cara, karena ada tiga topik utama dalam struktur yang mengalirkan masalah: *gendered knowledge and science of survival* (ilmu pengetahuan dan ilmu kelangsungan hidup teratur melalui gender), *gendered environmental rights and responsibilities* (hak dan tanggung jawab atas lingkungan hidup, dan *gendered environmental politics and grassroots activism* (politik yang paham lingkungan dan aktivisme akar rumput teratur melalui gender). Dengan perbatasan penelitian ini hanya kemungkinan membahas satu atau dua ini, walaupun biasanya dalam satu kasus ada banyak penyertaan lebih dari satu karena masalah jarang terpencil. Karena tujuan penelitian di sini adalah menyelidiki pengaruh LVC di Indonesia dan Jateng yang terkait dengan gender, topik *gendered environmental politics and grassroots activism* digunakan.

Juga yang akan digunakan adalah *gendered knowledge and science of survival*, karena ini sangat dipengaruhi pertanian industrial dan liberalisasi perdagangan pangan Indonesia, dan karena ini fokusnya kelompok SPI di Jateng. Sebenarnya bagian ini menjadi fokus lebih besar daripada *gendered environmental politics and grassroots activism*, tetapi dua-duanya saling terkaitan dan penting, jadi dalam diskusi kedaulatan pangan hubungan akan dibahas. Persoalan hak dan akses sumber daya adalah cukup besar untuk penelitian sendiri, jadi tidak pantas untuk penelitian ini, walaupun masuk sedikit tentang pembagian kerja dan keuangan keluarga petani; dalam rangka akses tanah dan sumber daya alam tidak ada sama sekali. Dua bagian kerangka ini akan dijelaskan dalam sektor berbeda, dan pada akhirnya akan dipadukan dalam rangka gambar besar EPF di Jateng dan Indonesia, bersama dengan tantangan masa depan LVC dan SPI, serta perempuan petani Indonesia.

4. Pangan dan perempuan petani di Indonesia dan Jateng

4.1 Sejarah peranan perempuan di Indonesia

Sebagai negara yang luas dan terdiri lebih dari 17,000 pulau, dengan ratusan bahasa daerah dan suku berbeda, Indonesia adalah tempat yang sangat beranekaragam dan sulit diseragamkan. Hal ini dicerminkan dalam peranan adat perempuan: dengan ratusan suku beda, tempat dihuni perempuan secara sosial tergantung pada sejarah daerah itu.

Di Jateng, adat peranan perempuan dan laki-laki sangat teratur, dan tradisi ini masih cukup kuat. Menurut Blumberg, ada tiga hal terutama yang mengusulkan kekuasaan perempuan di masyarakat: peraturan warisan, tempat tinggal, dan keturunan (Blumberg 1984). Di Jateng, warisan turun ke dua-duanya perempuan dan laki-laki, tetapi biasanya lebih cenderung ke laki-laki. Sistem tempat tinggal fleksibel antara keluarga, dan hubungan antara saudara perempuan kuat sekali, jadi menjadi jaringan dukungan, dan pada umumnya sistemnya lumayan setara (Wolf 1988:87). Biasanya di negara yang pernah dijajah, penjajah itu mengganggu sistem peranan adat antara perempuan dan laki-laki melalui kerusakan sistem pembagian kerja dan perubahan sistem pertanian, tetapi di Jateng pengaruh penjajah tidak sekuat daerah lain, dan memang perempuan masih ada peranan kuat dalam pembagian kerja dan pertanian.

Ini tidak berarti tidak ada masalah pada zaman dulu: nenek moyang perempuan Jateng menghadapi tantangan besar untuk tampil di masyarakat. Sudah berubah banyak sejak masa Kartini, di mana perjuangan untuk keadilan perempuan hanya mimpi yang sangat jauh. Kini, perempuan dididik, bisa masuk kuliah, bekerja di kantor dan menyertai dalam berbagai acara yang dulu tidak bisa. Meskipun demikian, masih ada keadaan yang dianggap kurang adil oleh berbagai kelompok, termasuk peranan perempuan di rumah tangga dan ruangan sosial, keterwakilan perempuan dan kekerasan melawan perempuan. Kini, kesadaran ditingkatkan dan jaringan antara kelompok perempuan dan kelompok keadilan sosial lain menjadi semakin kuat. Pada zaman Orde Baru, walaupun pada waktu itu pendidikan perempuan ditingkatkan dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dikurangi, kebijakan dan sikap pemerintah Suharto banyak merusak pemberdayaan perempuan. Satu-satunya organisasi perempuan yang diizinkan, Dharma Wanita, mendidik kaum perempuan menurut Panca Dharma Wanita, yaitu: wanita sebagai istri pendamping suami; wanita

sebagai ibu rumah tangga; wanita sebagai penerus keturunan dan pendidik anak; wanita sebagai pencari nafkah tambahan; dan wanita sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Jadi, walaupun kemampuan perempuan menyertai posisi sosial yang lebih kuat melalui pendidikan, masih pengharapan paling besar perempuan, khususnya di Jateng, adalah sebagai ibu dan istri (Armstrong 1994:135).

Setelah jatuhnya Orde Baru, pengaruh dari luar negeri dan kebijakan internasional yang disertai Indonesia kuat sekali, dan ini akan didiskusikan lebih lengkap dalam bagian ini. Ada yang baik dan buruk yang bisa timbul dari kedatangan tersebut, tetapi yang pasti adalah bahwa masih ada persoalan dengan perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Misalnya, anak perempuan dan laki-laki masih berbeda dalam rangka rumah tangga. Anak laki-laki diizinkan tidur sampai siang, sedangkan anak perempuan diharapkan bangun pagi dan membantu ibunya dengan persiapan di pagi hari. Kalau ibu sakit, anak perempuan yang diharapkan memenuhi semua keperluan keluarga sampai ibunya sudah sembuh, sedangkan kalau anaknya hanya laki-laki saja, ibu itu diharapkan tetap memenuhi semua kewajiban rumah tangga, padahal dia sakit.

Pengalaman perempuan petani mencerminkan itu perempuan Indonesia pada umumnya. Namun, ada marjinalisasi lebih parah karena petani, dan pengaruh perubahan sistem pertanian ada berbagai dampak buruk untuk petani perempuan. Memang, itu bukan saja perempuan yang dipinggirkan dari produksi panen, laki-laki juga, hanya efeknya berbeda. Perempuan petani harus melakukan tugasnya di rumah tangga dan keluarga, ditambah pekerjaan sawah dan pengelolaan hasil. Seringkali ini harus dilaksanakan dengan tanah sedikit, atau kalau tidak ada tanah, bekerja untuk orang lain, di daerah lebih terpencil jauh dari pelayanan umum.

EPF memberi alat untuk menyelidiki pengaruh internasional dalam konteks lokal, dan bagian ini membahas rangka itu melalui bagian EPF yang mendalami *gendered knowledge and science of survival*. Ini dilakukan melalui beberapa topik: peranan adat perempuan dalam pertanian dan perubahan dari pengaruh pertanian industrial dan liberalisasi; persoalan pembagian kerja dan buruh; perubahan pola hidup, dan penjelasan tindakan SPI untuk menghadapi persoalan yang dibicarakan.

4.2 Pengaruh dari pertanian neoliberal dan liberalisasi perdagangan terhadap perubahan peranan perempuan dan laki-laki

Perempuan di Jawa selalu memiliki peranan yang kuat di rumah tangga dan di dalam keluarga. Untuk perempuan petani, mereka juga memiliki peranan yang penting dalam pertanian, baik di sawah maupun dengan pengelolaan dan penjualan hasil panen. Hubungan masyarakat dengan pangan dan hubungan petani dengan lingkungannya diubah karena globalisasi neoliberal yang masuk Indonesia melalui kebijakan pemerintah. Akibatnya peranan perempuan dan laki-laki di dunia pangan juga berubah, dan muncul tanggung jawab berbeda. Industrialisasi mempengaruhi peranan adat perempuan di tingkat mikro dan makro, dan termasuk berbagai faktor, antara lain keluarga, daerah, status sosial, kebijakan pemerintah dan agama (Wolf 1988:86).

Pada tahun 1985 kebijakan liberalisasi perdagangan pangan dimasukkan pemerintah Indonesia. Ini didahului karena masa ‘boom’ minyak (1974 - 1981) sudah selesai, harga minyak turun banyak dan pemerintah mau mempromosikan ekspor yang bukan minyak untuk mendukung ekonomi (Sukiyono dan Siriwardana 2007:45). Itu justru tahun 1985 ketika mulai perubahan drastis dan kehancuran sistem pertanian adat dan perdagangan lokal di Jateng. Sistem pasar adat di Jateng berdasar kalender sendiri, dengan lima hari malah tujuh hari yang ada sekarang. Pasaran diatur sekitar lima hari tersebut, dengan pasar lokal diselenggarakan di tempat berbeda setiap hari supaya melayani berbagai daerah, tetapi tetap satu wilayah. Kebanyakan pangan masa itu hasil lokal.

Dalam proses-proses persiapan pangan untuk dijual atau dimakan, ada banyak adat yang semakin kurang atau hampir hilang sama sekali. Pada zaman Orde Baru pergeseran pola tidak terlalu parah dengan pembelian dan masyarakat biasa, tetapi di dalam kehidupan petani dan di sawah yang berubah, jadi lebih terasa di daerah pedesaan. Pengaruh dari Revolusi Hijau lebih berfokus ke pangan pokok, khususnya beras. Ini dinamakan ‘berbasisasi’ Indonesia (Harsun kom. pers.), yang kebanyakan ada di daerah bawah. Pengaruhnya juga menyebar ke tanaman lain dan juga ke daerah tinggi, tetapi tidak sekuat daerah bawah. Ini juga persoalan geografis; daerah atas lebih terpencil dan biasanya aksesnya lebih sulit. Karenanya, proses membuat makanan pokok lain sudah sulit sekali cari di Jateng, walaupun ada masih di beberapa daerah tinggi. Ini termasuk, antara lain, tiwul, yang singkong dibuat kecil seperti nasi; gaplek, yang potongan singkong yang dijemur; nasi jagung; dan berbagai makanan dibuat sagu, yang hampir hilang sama sekali.

Adat menumbuk beras atau tanaman lain seperti singkong, yang dilakukan perempuan, sudah tidak ada karena ada teknologi gilingan. Memang masih perempuan yang melakukan itu kini, tetapi juga laki-laki sekarang. Ini bukan sesuatu yang ada banyak dampak negatif untuk kehidupan perempuan, malah kehilangan adat dan ketergantungan bahan yang dibeli seperti bahan bakar yang digunakan untuk beroperasi gilingan mesin.

Pemakaian lumbung dulu adalah tanggung jawab perempuan. Mereka mengatur panen untuk disimpan di lumbung, serta pemilihan benih terbaik untuk disimpan untuk penanaman berikutnya yang juga disimpan di lumbung. Sekarang karena fokus panen adalah untuk penjualan lumbung jarang digunakan untuk itu, dan karena pembenihan adat hampir tidak ada, lumbung tidak diperlukan lagi.

Program pemerintah kini untuk perempuan petani lebih berfokus ke pengelolaan hasil dan merperlakukan pangan lebih sebagai komoditas. Memang perempuan yang mengelola hasil panen dulu, tetapi tanggung jawabnya lebih beranekaragam juga, termasuk keberadaan di sawah dan pembenihan. Fokus program-program tersebut menguatkan peranan perempuan di luar sawah dan menguatkan komersialisasi pangan. Ini meneguhkan peranan pertanian bukan sebagai sesuatu untuk menghasilkan pangan sendiri, malah sumber uang, yang membentuk hubungan berbeda dengan pangan dan tanah.

Kuangan keluarga petani juga dipengaruhi sistem baru. Dulu peraturan uang lebih setara antara laki-laki dan perempuan. Karena berbagai alasan, termasuk sikap patriarki yang dikuatkan pada zaman Orba dan peningkatan peranan laki-laki dengan penjualan panen, perempuan sekarang hanya mengurus keuangan rumah tangga, yang dianggap sedikit dengan uang yang diterima dari panen, yang biasanya uang yang lebih besar. Ada praktek sekarang di mana panen dijual langsung dari sawah, biasanya oleh laki-laki, yang berarti mereka menerima uang panen secara langsung, dan itu mereka yang menggunakan uang itu. Secara tradisional itu perempuan yang mengelola penjualan panen karena itu mereka yang ke pasar. Masalah keuangan ini mencapai hutang juga. Terkadang kalau uang keluarga petani tidak cukup untuk menanam sawah. Banyak petani memilih meminjam uang dari sumber luar untuk dapat menanam, dan ini berarti bahwa waktu panen, hasil panen langsung dibeli orang atau perusahaan itu yang sumber uang. Salah satu akibat penjualan langsung dalam dua kasus tersebut ini adalah bahwa penjemuran panen (biasanya beras), yang juga merupakan salah satu tanggung jawab perempuan.

Pembenihan

Pada tahun 1970an bersama dengan masuknya Revolusi Hijau, penjualan benih yang disimpan sendiri menjadi tidak sah. Diperbolehkan untuk simpan sendiri dan bertukar dengan tetangga, tetapi menjual benih itu dianggap pencurian dari perusahaan besar. Ini menjadi salah satu cara penguasa benih bisa masuk ke pasar Indonesia, lewat kebijakan pemerintah dan upaya akademis dalam bidang agraria untuk meningkatkan hasil tani. Akan tetapi, pembenihan adalah masalah besar di Indonesia, dalam arti kedaulatan. Dari ribuan jenis beras yang berada sebelum benih hibrida masuk ke pasar Indonesia pada tahun 1980an, hanya tinggal kurang dari seratus. Kekurangan benih lokal ini sudah menyebar ke tanaman selain beras; di Jateng, tidak bisa mencari benih jagung lokal sama sekali, yang dulu ada berbagai macam. Di daerah bawah, bisa diucapkan bahwa hampir 100% tanaman ditumbuh dari benih hibrida; di daerah atas, 75% saja, dengan sekitar 25% yang masih lokal (Inayah, kom. pers.). Pembenihan tradisional memerlukan pengetahuan luas tentang sumber hidup ini; berapa benih seharusnya disimpan untuk panen berikutnya, bagaimana mengenali benih yang bermutu tepat untuk disimpan, cara penyimpanannya, dan pembiakan benih. Walaupun kehilangan benih lokal ada akibat untuk semua manusia dan kedaulatan semua petani, ini juga persoalan yang terkait dengan gender, karena itu perempuan yang mengolah pembenihan. Sebagai pengurus pembenihan tradisional, perempuan lebih terpengaruh oleh pemasukan benih hibrida.

Selain benih hibrida yang diimpor, ada banyak jenis yang direkayasa di Indonesia sendiri. Sebagai pekerja adat dalam pembenihan, perempuan yang dipekerjakan paling banyak untuk pemuliaan benih ini: ketika perempuan tidak ada akses ke tanah, kemungkinan mereka akan menjadi buruh. Ini berarti mereka bekerja untuk perusahaan malah cara berdaulat, dalam bidang yang mendukung pertanian yang tergantung pada sistem pertanian neoliberal dan mengkomersialisasikan benih. Akibat lain dari rekayasa hayati adalah bahwa pertanian organik menjadi sulit dilaksanakan. Mungkin ada petani yang mau menjadi organik lagi, tetapi ketergantungan benih hibrida berarti mereka harus memakai pupuk kimia dan pestisida karena benihnya dibuat dengan trampil yang tergantung pada itu. Kalau tidak ada jenis benih lokal yang bisa menggantikan, seperti dengan jagung di Jateng, tidak ada pilihan lain.

Bisa terlihat bahwa kehilangan pembenihan dan kekurangan pekerjaan perempuan dalam pengelolaan pangan, termasuk persiapan pangan dan penyimpanan, ada pengaruh terhadap peranan adat agraria perempuan, yang menempatkan perempuan lebih di rumah tangga dan mengubah

kekuasaan mereka atas tanah dan pangan mereka sendiri. Ini ada akibat yang luas untuk peranan perempuan di daerah hidup lain juga, khususnya di rumah tangga. Sekarang persoalan buruh akan didalami secara lebih lengkap.

4.3 Pembagian kerja dan buruh

Pada umumnya, pertanian merupakan bagian semakin kecil GDP kedaerahan di Indonesia. Pada waktu antar tahun 1971 sampai 1999, bagian GDP kedaerahan turun dari 40% sampai 18% di Jawa, dibandingkan dengan keturunan nasional dari 51% sampai 38% (Sukiyono dan Siriwardana 2007:47). Namun, kebanyakan penduduk Indonesia masih bekerja di bidang pertanian, sampai 70%, dan sekitar 60% angka itu adalah perempuan. Walaupun itu perempuan yang kebanyakan pekerja pertanian, masih ada masalah dengan kesetaraan upah, dengan upah perempuan bisa sampai 35% kurang daripada laki-laki dalam pekerjaan yang sama. Ini juga benar di Jateng, di mana perempuan dapat sekitar Rp.20.000 per hari dan laki-laki dapat sekitar Rp.30.000 (La Via Campesina 2013, Inayah, kom. pers). Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa laki-laki bekerja lebih banyak di sawah sekarang. Peranan adat perempuan adalah banyak di sawah, dan memang itu dua-duanya laki-laki dan perempuan yang mengerjakan sawah, tetapi ini ada akibat dari perubahan sistem pembenihan dan pengelolaan, yang disebutkan di bagian terakhir.

Beberapa dekade terakhir ada banyak migrasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan, termasuk banyak petani. Ini gejala dari perubahan sistem pertanian global dan penggantian pertanian skala lokal untuk pertanian semakin besar dan pakai mesin dan kimia malah tenaga kerja manusia. Pekerjaan di industri manufaktur menggantikan sebagian pekerjaan pertanian di Jawa, tetapi masih hanya 17% dari jumlah tenaga kerja (Sukiyono dan Siriwardana 2007:47). Jadi perempuan lebih bekerja sebagai buruh sekarang, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kebanyakan buruh migran yang ke luar negeri adalah perempuan, karena itu singkatan TKW (Tenaga Kerja Wanita) muncul. Diperkirakan jumlah buruh migran Indonesia perempuan yang berada di luar negeri sebesar 3 juta orang, dan kebanyakan pada usia produktif, yang juga bisa memunculkan masalah lain. Sebagian besar bekerja di sektor domestik dan manufaktur. Ada berbagai alasan mengapa perempuan kota memutuskan pergi ke luar untuk merantau: biasanya mereka dari keluarga lumayan miskin, jadi tidak mampu mengikuti pendidikan lebih lanjut setelah SMA. Kalau tidak punya tanah keluarga, tidak akan ada keterampilan banyak di bidang pertanian, atau kalau punya keterampilan, tidak punya tanah. Terkadang ada hutang juga, dan kombinasi kenyataan ini merupakan keadaan alasan

cari uang di luar negeri, di mana bisa dipekerjakan tanpa keterampilan tinggi dan dengan pendapatan lebih baik.

Sebagian besar TKW datang dari daerah pedesaan, dan ini ada banyak akibat. Yang pertama, pemisahan keluarga. Perempuan dianggap sebagai tulang punggung rumah tangga, dan ketika mereka tidak ada, bisa muncul berbagai masalah, termasuk ketergantungan suami kepada pengiriman uang, suami yang menikah lagi, dan masalah dengan anak-anak. Di tingkat desa, migrasi keluar berarti tenaga kerja di desa kurang, dan ini ada berbagai akibat. Menyiangi sawah adalah pekerjaan perempuan biasanya, jadi kalau tidak ada cukup banyak tenaga kerja, penggunaan pestisida juga ditingkatkan untuk melawan hama.

Dengan keuntungan keuangan yang bisa didapat lewat pekerjaan sebagai buruh pabrik, juga kemampuan perempuan untuk mendukung keluarganya dan kehidupannya menjadi lebih tinggi. Karena tujuan pertanian neoliberal dan memang tujuan pemerintah Indonesia sekarang adalah untuk mengurangi jumlah petani kecil yang ada di Indonesia, peningkatan buruh pabrik ini dilihat sebagai sesuatu yang baik untuk kaum perempuan yang mau cari pekerjaan yang beruntung. Tetapi, ini meremehkan kekuasaan perempuan itu dengan hak memilih cara hidupnya, khususnya yang terkait dengan pangan.

4.4 Perubahan pola hidup

Pada umumnya, di Indonesia tidak ada banyak kesadaran tentang kedaulatan pangan dan agroekologi, walaupun ada banyak organisasi yang melawan pertanian neoliberal dan sistem kapitalis dan neoliberal pada umumnya. Keberadaan televisi, pengaruh dari luar negeri dan iklan semua membantu mengubah sikap masyarakat terhadap pola makannya. Pada zaman Orde Baru, belum ada pengaruh kuat dari konsumerisme dan pemerintah mencegah masuknya banyak pengaruh dari dunia luar, padahal pada zaman itu yang mulai keberadaannya. Perubahan ini bisa dipertalikan dengan masuknya liberalisasi kebijakan perdagangan pada tahun 1998 dan beberapa sebelumnya: itu pada tahun 2000 yang mencapai puncaknya di Jateng, dan titik tinggi itu belum turun. Penguasa pangan, banyak dari luar negeri tetapi juga di Indonesia sendiri, membentuk ide tentang konsumerisme, dan pangan menjadi komoditas, bukan hak. Sikap konsumeris ini tidak hanya terhadap pangan, tetapi dengan berbagai sisi kehidupan, akibat utamanya keinginan semua cepat. Ini mendukung sistem pertanian neoliberal global, tetapi akibatnya pada akar rumput parah sekali.

‘Pangan sudah dikuasai kapitalisme. Kesehatan sudah dikuasai kapitalisme. Anak-anak ke toko untuk beli obat, bukan ke cara adatnya, dan hidup sudah menjadi cepat, semua harus cepat diperbaiki, tidak bisa tunggu beberapa hari untuk sembuh secara alami. Di semua sisi kehidupan, cepat. Kapitalisme tahu kelemahan kita. Tahu bahwa kita mau semua yang kelihatannya baik, rasanya enak, dibuat cepat dan dikasih cepat.’ (Harsun, kom. pers.)

Itu filsafat pangan yang sangat berubah sekarang: cara menanam, untuk siapa, dan oleh siapa. Berarti, hubungan orang dengan makanannya juga berubah, petani serta orang biasa.

‘Berasisasi’ yang disebutkan di bagian terakhir juga menjadi satu penyebab yang sangat besar dengan kehilangan makanan pokok lain, seperti ubi, singkong, ketela dan lain-lain. Selain akibat dalam peranan kerja yang terkait dengan gender, juga ada konsekuensi dalam kesehatan. Ubi dan singkong ada berbagai bahan gizi yang beranekaragam dibandingkan dengan beras. Walaupun nasi itu sehat, cara prosesnya sekarang yang pakai mesin gilingan mengeluarkan semua kulit ari secara bersih, jadi itu menjadi nasi putih. Sayangnya itu bagian di mana ada paling banyak bahan gizi, yang masih tinggal banyak di berasnya waktu dulu ketika masih ditutu tangan, yaitu semacam nasi coklat.

Pada 1990an, masuk gandum ke pasar Indonesia. Tidak ada penanaman gandum komersial di Indonesia, jadi ini diberi oleh Amerika Serikat dalam bentuk subsidi di mana gandum gratis. Selain kehancuran yang disebabkan di Amerika Serikat karena peningkatan panen ekspor ala Revolusi Hijau juga, gandum itu menjadi salah satu makanan pokok di Indonesia, dalam bentuk roti dan mie instan. Konsumsi mie instan sudah sangat besar sekarang bahwa Indonesia adalah konsumen kedua di dunia mie instan, dengan 14.5 milyar bungkus dimakan setahun (WINA 2013). Sayangnya, ini juga menggantikan banyak makanan pokok adat dan proses pembuatannya, seperti disebutkan di atas.

Kesehatan

Perubahan di bidang kesehatan adalah satu daerah di mana akibat dari perubahan sistem sosial dan agraria bisa terlihat secara luas. Di masyarakat umumnya, penyakit yang tidak menular semakin banyak, termasuk diabetes, asam murat, kolesterol tinggi, darah tinggi dan kanker di kaum dewasa dan obesitas dan kerugian gizi di kaum mudah. Perubahan ini mencerminkan perubahan produksi pangan sejak Revolusi Hijau dan perubahan pola makan sejak liberalisasi. Sejak tahun 1972,

keadaan penyakit jantung dan pembuluh darah sudah menjadi penyakit degeneratif yang paling menyebabkan kematian di Indonesia (Azwar 2004:1).

Yang pertama, pekerjaan di sawah dengan kimia yang berada di dalam pestisida dan pupuk. Kebanyakan penyemprot adalah perempuan. Dulu itu perempuan yang menyiangi rumput dan mengurus tanaman buruk di sawah. Sekarang perempuan tetap mengatur itu, tetapi bentuknya berubah dan menjadi penerapan pestisida kimia yang menghancurkan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Menurut suatu penyelidikan di Lampung, penggunaan pestisida sekarang berarti kimia dari pestisida bisa ditemukan di darah petani pada tingkat tidak aman (Rustia 2009). Selain efek kesehatan langsung, juga ada akibat dari penggunaan teknologi pertanian industrial, yaitu kehilangan perkembangan pengetahuan pertanian berwawasan alam. Satu contoh adalah mina padi, suatu pengendalian hama terpadu, di mana ikan ditaruh di air sawah padi waktu kecil, mereka makan hama yang berada dan nanti waktu sudah besar menjadi sumber uang juga. Kehilangan kearifan perempuan tentang teknologi pertanian alami hampir hilang, akibatnya mempengaruhi juga kemampuan dan pengetahuan perempuan untuk mengolah pangan yang sehat untuk keluarga.

Pola makan juga sangat dipengaruhi. Pada pokoknya, rumah tangga dianggap wewenang perempuan. Sebagai pembeli, pemasak dan pemangku makanan keluarga, perempuan bertanggung jawab kesehatan keluarga, dan dengan perubahan budaya mereka sangat dipengaruhi beli makanan menurut iklan, yang modern dan keren. Pandangannya sudah adalah bahwa pangan lokal, itu ...'kurang baik, itu buruk, itu makanan ayam saja' (Inayah, kom. pers.). Orang bangga beli makanan luar dan makanan dibungkus, yang pasti lebih mudah menyiapkan. Selain akibat budaya, ini ada akibat kesehatan. Banyak makanan instan ada bahan berbahaya untuk kesehatan, seperti pengawet, penguat rasa, warna palsu, rasa palsu, dan pemanis palsu antara lain. Juga ada peningkatan penggunaan gula dan garam, serta penggorengan makanan di mana sebelumnya tidak ada.

4.5 Pengaruh SPI

SPI bukan organisasi satu-satunya di Indonesia yang berjuang untuk hak-hak petani perempuan, kedaulatan pangan atau agroekologi. Sebaliknya, waktu FSPI yang pendahulu SPI berdiri, juga ada banyak aliansi, serikat dan organisasi petani lain yang berdiri sekalian, karena jatuh Orde Baru berarti organisasi mandiri diizinkan. SPI ada keberadaan di Jateng sejak awal, dan sebetulnya lebih

kuat daripada Jawa Barat atau Timur karena anggotanya menyatukan waktu FSPI menjadi SPI pada tahun 2007. Sekarang ada di 7 kabupaten di Jateng, dan kantor utamanya ada di Semarang. Dari keanggotaan nasional SPI yang diperkirakan sekitar sejuta, Jateng ada sekitar 75,000 anggota. Keanggotaan diperkirakan lebih banyak di Jateng (50%) daripada tingkat nasional (40%). Walaupun selalu ada gerakan yang kuat pertanian organik dan daulat di Jateng, sebulan lalu mulai mungkin masa baru yang terkait dengan politiknya. Gubernur terpilih dalam pemilihan propinsi, Ganjar Pranowo, seorang yang mendukung pertanian organik, kedaulatan pangan dan menolak agrobisnis. Sampai sekarang, pertanian organik di Jateng sekitar 25%, khususnya di daerah atas.

Suatu survei yang dilakukan di Jateng dengan penghasil pangan tahun 2013 menunjukkan bahwa 90% pangannya dibeli, walaupun mereka petani. Di sisi lain, hampir semua anggota SPI makan pangannya sendiri. Pola ini mencerminkan pola internasional di mana komodifikasi pertanian subsisten berarti petani semakin tergantung pada pasar di mana dulu sebagian besar swasembada (Claeys 2012:846). Jadi, pengaruh dari SPI kepada anggota perempuannya untuk menguasai pola makan yang diambil dari hasil sendiri jelas. Namun demikian, masalah dengan pola makan yang terkait dengan hal lain tetap ada dalam keluarga anggota SPI, jadi belum mencapai mengubah sepenuhnya.

Tujuan SPI di Jateng, dan memang di Indonesia, sekarang ada untuk menguatkan peranan perempuan dengan percaya diri mereka sebagai penyerta kedaulatan pangan. Di tingkat lokal, artinya menguatkan keambilan keputusan, pendidikan tentang bagaimana perempuan petani bisa menjadi lebih kuat di sawah dan rumah tangga, juga dengan hal seperti pembagian kerja. Walaupun keterwakilan di tingkat daerah dan nasional belum mencapai, untuk mengubah pola itu harus mulai di akar rumput. Perempuan jarang masuk ke ruangan publik kalau mereka tidak merasa diberdayakan masyarakatnya atau didukung keluarganya. Akan tetapi, kalau budaya patriarki masih berada di rumah tangga, perempuan harus sadar apa itu dan bagaimana berlawanan itu secara produktif yang mencari dukungan keluarga.

Ada titik pertemuan antara peranan adat Jateng dan impor konsep perempuan dari luar, dimasukkan dari globalisasi melalui media massa, internet dan sastra. Ini juga berhubungan dengan peranan perempuan di agama Islam yang agama utama di Indonesia, tetapi itu di luar jangkauan penelitian ini. Bagaimana wacana internasional yang diciptakan perempuan petani di LVC mempengaruhi keadaan peranan perempuan petani di Jateng rumit serta sulit memisahkan dari perjuangan

perempuan Jateng pada umumnya. Dampak dari budaya konsumeris juga ada peranan besar di berbagai tingkat masyarakat, dan bagaimana diwujudkan di dalam kehidupan petani perempuan di Jateng dan di dalam organisasi SPI merupakan tujuan penelitian ini.

Benih juga merupakan salah satu simbolisme paling besar untuk LVC. Di setiap pertemuan internasional, ada pertukaran benih, yang melambangkan kedaulatan. LVC menyelenggarakan penyuluhan pembenihan dengan anggotanya, khususnya dengan penyimpanan benih dan dengan pendidikan yang memberi alasan mengapa pembenihan itu penting. Pembenihan merupakan salah satu hal yang paling penting di agroekologi, dan pada tahun 2011 Pertemuan Internasional untuk Petani Benih di LVC yang pertama diselenggarakan di Indonesia, dan pada tahun 2012 Pertemuan Global Pertama untuk Agroekologi dan Pembenihan Petani diselenggarakan di Thailand (La Via Campesina 2012:6). LVC menganggap benih sebagai sejarah dan pusaka orang pedesaan, serta sesuatu yang seharusnya dimiliki semua manusia secara gratis, bukan 'patent atas kehidupan' dan menolak semua bentuk patent, hibrida dan rekayasa hayati (La Via Campesina 2012:11). SPI ada program untuk Perlawanan Benih Petani pada tingkat nasional di Indonesia. Tidak khususnya untuk perempuan, tetapi sebagai pengurus dan penjaga pembenihan secara adat, menarik lebih banyak perempuan, dan memang keadaannya di Jateng.

Di UU baru tentang pangan (2013), tidak ada sebutan tentang pembenihan. Salah satu pengurus LVC di Jateng adalah yakin bahwa UU baru ini memperakui hak menjalankan pembenihan secara alam, yang dulu menjadi tidak sah. Sayangnya, ternyata perempuan atau pembenihan tidak disebutkan sama sekali dalam UU Pangan baru. Ada kenyataan tentang kedaulatan pangan dan banyak yang lain yang berguna, tetapi dua hal itu kurang. Tambahan pula, masih tinggal ayat yang membahas penggunaan rekayasa hayati, yang sebenarnya sebaliknya dengan pembenihan adat. Mungkin lagi penegakan hukum dengan penjualan benih tidak begitu kuat, tetapi memang itu masih sesuatu yang seharusnya diubah dan SPI pada masa depan pasti akan lagi mengejar.

5. Organisasi dan perempuan petani

5.1 LVC, patriarki dan keadilan gender

Para perempuan mengalami kerugian struktural di bidang pertanian, dan telah menjadi persoalan sangat penting dalam perdebatan kedaulatan pangan (Patel, 2012:2). Di Indonesia, seperti di negara lain yang pernah mengalami rezim patriarkal, persoalan dengan kerugian perempuan sudah terasa cukup lama. Pemerintah Orde Baru dan kepemimpinan presiden, Suharto (dikenal sebagai ‘Pak Harto’), dilegitimasi dari subordinasi perempuan serta eksploitasi lingkungan hidup. Fenomenon tersebut mulai pada zaman Orde Baru, ketika perempuan diketahui sebagai pelaku dalam kudeta komunis pada tahun 1965, dan kekurangan perwakilan politik perempuan yang berikutnya (Wieringa, 2001:3). Nasionalisme yang dibentukkan Suharto sangat terkait dengan patriarki dan militerisme, dan perwakilan perempuan ada kesulitan memajukan melawan kekuasaannya. Sejak permulaian zaman Reformasi, telah banyak organisasi dan gerakan perempuan yang lebih mewakili minat perempuan dalam dunia politik, dan Indonesia mulai lagi mempersoalkan hal kesetaraan gender. Meskipun begitu, sekarang wacana pembangunan neoliberalisme sudah menyebar ke seluruh dunia.

Sebelum Konferensi Internasional ke-6 LVC pada Juni 2013, LVC mengakui peranan perempuan dalam gerakannya. Pada tahun 1996, tiga tahun setelah pendirian LVC, Komisi Perempuan didirikan, dan pada waktu Konferensi Internasional ke-3, empat tahun kemudian, keterwakilan perempuan sudah maju sekali, dengan partisipasi perempuan dalam semua kegiatan LVC dan juga dengan ruangan penting khususnya untuk perempuan untuk menentukan tujuannya (Desmarais 2004:140). Pada setiap konferensi, perkumpulan petani perempuan merupakan salah satu kelompok utama, dan mereka menciptakan deklarasi atau laporan tentang perempuan melawan patriarki dan kekerasan terhadap perempuan, serta kegiatannya seperti apa. Di dalam deklarasi pada Konferensi ke-6 tersebut diakui bahwa kesetaraan gender di bidang pertanian tidak bisa terjadi sepenuhnya dengan keadaan pengaruh paradigma pertanian neoliberal, karena peranan perempuan dalam kehidupan petani tidak jelas lagi; sistem baru sudah menggantikan sistem adat dan mengganggu keseimbangan kekuasaan (LVC 2013). Agroekologi, dalam cara apapun yang digunakan di negara sebelum kedatangan pertanian neoliberal dan perekonomian pertanian neoliberal, bisa menganekaragamkan baik panen maupun pola pemikiran masyarakat.

8 tahun lalu LVC mendirikan Panitia Internasional Untuk Kekerasan Melawan Perempuan. Panitia ini menghadapi persoalan kekerasan tidak hanya dalam arti biasa, tetapi juga kekerasan struktural yang terkait dengan akses ke pelayanan dan tanah, kerugian keuangan, pembagian kerja dan lain-lain. Menurut EPF, ada peningkatan keberadaan perempuan dalam gerakan aktivis pada tingkat global, dan ini disebabkan perubahan lokal dengan keadaan perempuan dan pengaruh kecenderungan wacana ke 'pengembangan keberlanjutan' pada tingkat nasional dan internasional (Rocheleau *et al.*, 1996:15).

5.2 SPI: antara global dan akar rumput

Wacana LVC di suatu negara, sangat tergantung kepada tujuan anggotanya. Walaupun ada pertemuan internasional di mana tujuan dan keinginan LVC dikerjakan bersama, caranya menjadi nyata pada tingkat akar rumput harus melalui organisasi anggota. Artinya wacana LVC harus menyesuaikan dengan suasana lokal, yaitu organisasi anggota yang menterjemahkan wacananya dan membentuk gerakan di konteks negaranya.

Di Jateng, seperti di tingkat nasional, pengurus perempuan satu-satunya adalah pengurus yang bertanggung jawab untuk departemen perempuan. Di kantor Jateng, ini berarti hanya 1 dari 10 pengurus adalah perempuan (10%), sedangkan di karyawan ada 40%, dan di setiap kabupaten ada sekitar 10% dari pengurusnya. Walaupun memang tujuan SPI adalah 50%, kenyataan adalah jauh berbeda. Bukan karena tidak ada kesempatan untuk perempuan menjadi pengurus atau karyawan, tetapi karena tidak ada banyak keinginan dari kaum perempuan. Perempuan petani sudah memiliki tanggung jawab besar, termasuk pekerjaan di sawah, pengelolaan dan penjualan hasil, pengurusan rumah tangga dan yang paling penting, keluarganya. Sulit sekali perempuan meninggalkan rumah dan keluarganya, dan memang lebih berat dari laki-laki. Harus ada dukungan kuat dari suami atau keluarga untuk dapat ke luar rumah, dan terkadang mungkin tetap kesulitan waktu sudah ada dukungan, karena secara adat juga tanggung jawab perempuan.

Pada tahun 2007 ketika SPI menjadi persatuan, ada sekitar 700,000 anggota. Angka keanggotaan tidak bisa tepat karena terkadang hanya ada satu anggota per rumah tangga tapi semua rumah tangga ikut, terkadang ada beberapa anggota di satu rumah tangga. Sekarang pada tahun 2013, belum ada angka pasti tetapi diperkirakan sekitar 1 juta.

Perempuan sebagai anggota SPI

Sebagai negara yang beranekaragam, Indonesia memiliki berbagai adat yang memperhitungkan peranan dan kewajiban perempuan dan lelaki secara berbeda-beda. Karena itu, SPI mengalami kesulitan untuk membuat peraturan umum yang bisa dilaksanakan secara seragam yang terkait dengan perempuan, sehingga lebih banyak kantor dewan wilayah yang memutuskan bentuk kegiatan departemen perempuan mereka. Pada umumnya, ada fokus lebih ke pemilikan tanah, dan kesetaraan di ruangan sosial dan kerja. SPI berusaha untuk melibatkan perempuan karena jika ibu menjadi anggota serikat berarti suami dan anaknya juga harus mengikuti. Kalau lelaki yang menjadi anggota, tidak wajib istri dan anaknya ikut.

Perempuan sebagai pengurus dan karyawan SPI

Menurut peraturan LVC yang disetujui semua anggota, keterwakilan pengurus seharusnya seimbang antara laki-laki dan perempuan, yaitu 50%, dan dalam perwakilan kedaerahan itu memang terjadi (Desmarais 2008:146). Padahal, pada tingkat nasional dan lokal itu kadang memunculkan kesulitan. Perempuan sering memiliki kewajiban lebih besar daripada lelaki, dan merasa lebih bertanggung jawab kepada keluarga dan rumah tangganya. Harus ada dukungan yang kuat untuk bisa meninggalkan semua urusan pribadinya untuk menjadi suatu pengurus. Dalam SPI sendiri ada kebijakan organisasi untuk perwakilan 50/50 sejak awal, tetapi sampai sekarang belum jadi. Dalam Majelis Nasional ada perwakilan perempuan sekitar 30%.

Kewajiban LVC bahwa anggotanya harus ada keterwakilan rata antara perempuan dan laki-laki ada pengaruh langsung dengan penyertaan perempuan di organisasi SPI dan perjuangannya. Keterwakilan perempuan di organisasi tidak ada sejarah yang baik di Indonesia, kecuali di organisasi khusus perempuan. Ini mulai berubah dalam dekade terakhir, tapi masih jauh dari harapan. Di kebanyakan organisasi dan pada tingkat nasional keterwakilan masih kecil, dan memang di SPI, di mana ada kewajiban keterwakilan rata, kenyataan berbeda dengan keinginan.

Di tingkat internasional, LVC memang ada wakil laki-laki dan perempuan dari setiap daerah, termasuk Asia Tenggara. Memang, pengurus umum Asia Tenggara dan Timur adalah perempuan. Dalam organisasi SPI, pengetahuan dan kesadaran tentang isu yang terkait dengan gender kelihatannya lumayan tinggi.

Di banyak negara anggota LVC, antara lain Korea dan Brazil, salah satu organisasi anggota adalah organisasi petani perempuan. Walaupun ada banyak serikat petani perempuan pada tingkat propinsi atau lokal, Indonesia tidak memiliki organisasi petani perempuan pada tingkat nasional yang bisa menjadi anggota LVC, jadi SPI bertanggung jawab selengkapnya untuk persoalan kesetaraan gender dalam gerakannya.

6. Kedaulatan pangan dan pengaruh LVC

6.1 Keadaan kedaulatan pangan

Aliran serikat petani di Indonesia tidak seragam. Setiap organisasi petani memiliki tujuan dan isu utamanya, dan ini tergantung pada banyak hal, termasuk pemimpin, lokasi, pemerintahan lokal, dan lain-lain. Pada umumnya, NGOs perempuan dan NGOs lingkungan hidup baru mulai tujuan mereka saling memperhatikan. Sejauh serikat petani, tampaknya organisasi paling besar di Jawa Tengah sudah memasukkan persoalan keadilan perempuan dalam wacana utamanya. LVC mengidentifikasi diri mereka sebagai organisasi massa atau gerakan sosial, jadi kalau ada organisasi yang bukan anggota mereka, tetap diundang untuk menyertai kegiatan LVC tertentu. Hal ini juga berarti bahwa pengaruh LVC lebih luas dari SPI sendiri, dan tetap sulit menyebut berapa besar pengaruhnya karena ini.

Salah satu hal yang disebutkan semua pihak yang diwawancarai di penelitian ini menyebutkan satu hal tentang perdagangan internasional dan bebas yang menyingkatkan masalah besar untuk petani: tidak menjanjikan pasar. Petani lokal harus bersaing dengan pangan diimpor, yang seringkali lebih murah.

Sebagai satu-satunya anggota LVC di Indonesia, SPI bertanggung jawab kebanyakan pengaruh di tingkat lokal. Namun, ada pengaruh di organisasi lain di berbagai tempat. Dua serikat petani, Serikat Petani Pasundan (SPP) dan Serikat Petani Jawa Timur (SPJT) adalah anggota FSPI tetapi memutuskan tidak menjadi anggota SPI. Dari sebelas organisasi anggota yang ada di FSPI, ada tiga saja di luar Sumatra, dan ketiganya berada di Jawa. Dari tiga anggota itu, yaitu dua disebutkan di atas dan Serikat Petani Jateng, itu organisasi Jawa Barat dan Jawa Timur yang memutuskan tidak menyatukan dengan SPI, jadi itu Jateng saja yang gabung. Sejak waktu itu timbul kantor wilayah SPI di berbagai tempat. Pasti SPP dan SPJT sudah ada prinsip-prinsip LVC di dalam organisasi mereka sendiri, walaupun bukan anggota LVC sekarang.

Selain mantan anggota FSPI, ada pengaruh dengan organisasi lain. Koalisi Masyarakat Untuk Kedaulatan Pangan didirikan karena pengaruhnya LVC. Organisasi yang bekerja dengan kedaulatan pangan dan pertanian organik ada banyak, walaupun penggunaan istilahnya mungkin tidak sama

sekali dengan LVC. Termasuk Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Tani Merdeka (Setam), Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT), Aliansi Organik Indonesia (AOI) dan Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI).

Salah satu tindakan yang hasil langsung dari pengaruh LVC di Indonesia ada perubahan UU Pangan pada tahun 2013. Tulisan baru ini didasar naskah akademis SPI, dan termasuk beberapa konsep baru, seperti kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan kearifan lokal, antara lain.

6.2 Kedaulatan perempuan

Situasi kesetaraan dan peranan perempuan dan laki-laki tidak seragam di semua tempat. Walaupun studi ini berfokus kepada Jateng, dalam propinsi itu juga ada perbedaan antara daerah dan keluarga. Sikap patriarki memang kurang sekarang daripada pada zaman Orde Baru, tetapi digantikan dengan sikap komersial dan konsumeris. Memang, masih ada peninggalan dari zaman Orba yang terkait dengan patriarki: salah satu contoh adalah penggunaan istilah *gender* dan *feminisme*. Dua istilah ini tidak bisa banyak digunakan di ruangan publik, karena dianggap konsep dari dunia barat dan bukan sesuatu yang sesuai dengan nilai adat Indonesia. Dugaan kejahatan Gerwani ada peranan juga dalam peninggalan tersebut ini (Wieringa 2001). Ini tidak berarti bahwa tidak ada orang yang sadar tentang persoalan kesetaraan gender, hanya bahwa istilah yang digunakan berbeda, seperti *keadilan perempuan* dan *kesetaraan antara perempuan dan laki-laki*. Istilah *kedaulatan perempuan* sekarang mulai digunakan, khususnya di bidang pertanian dan bersama dengan istilah *kedaulatan pangan*. Kedaulatan perempuan berarti kemampuan perempuan membentuk hidupnya sendiri dan mewakili minat mereka dalam ruangan publik maupun pribadi.

Pengaruh internasional dari liberalisasi dan perdagangan internasional banyak mengubah bentuk pertanian di Indonesia dan melalui itu, pengalaman perempuan petani. Perubahan tersebut bisa terlihat dari perubahan pola makan, kemunculan penyakit yang terkait dengan pangan, pembagian kerja, kekuasaan atas pemilihan kehidupan, pola migrasi, pembenihan dan perubahan peranan adat perempuan lain di pertanian. Kedaulatan perempuan dan keadilan perempuan adalah perjuangan petani perempuan untuk pengakuan peranannya, dampak dari sistem perdagangan, hak-hak sebagai anggota masyarakat dan kenaikan keterwakilan, dan perjuangan itu berada di berbagai organisasi dan tempat selain SPI, walaupun belum banyak diakui.

Itu penting bahwa perempuan cukup diwakili, supaya pengalaman dan perbedaan kebutuhan mereka dilibatkan dalam perencanaan sistem pangan, perdagangan dan pekerjaan. Pengalaman ini harus menjadi sebagian perencanaan biasa, karena banyak yang sudah diwakili kini adalah pengalaman laki-laki, karena laki-laki yang menguasai kepemimpinan secara sejarah. Walaupun keterwakilan sudah naik, masalah-masalah yang dihadapi perempuan petani di penelitian ini tidak bisa diatasi sampai keterwakilan mencapai tingkatan setara. Kerugian perempuan berbeda dengan kerugian laki-laki, dan walaupun ada keadaan yang bisa merugikan dua-duanya, perbedaan ini kurang diperhatikan secara lengkap yang sampai ke akar rumput. Kenyataannya keadilan perempuan masih jauh dari pengakuan. Ada berbagai alasan karena perempuan tidak ada sebanyak laki-laki di ruangan publik perjuangan.

Yang pertama, sejarah mereka sebagai tulang punggung keluarga berarti perempuan merasa lebih tanggung jawab perawatan keluarga dan rumah tangga. Begitu sangat sulit perempuan meninggalkan rumah dan keluarga untuk berjuang dengan organisasi: harus ada dukungan besar di sisi keluarga, dan sikap itu belum ada banyak. Seperti disebutkan di penelitian ini, ruangan di mana perubahan paling diperlukan di Jateng adalah di rumah tangga, karena di situ tetap tinggal sikap patriarki yang mencegah perempuan memberi suara dan pendapat mereka di luar. Yang kedua, menurut sejarah Indonesia tidak ada sebanyak keterwakilan perempuan dibandingkan dengan laki-laki, baik adat maupun politik. Pemimpinan Orde Baru yang telah disebutkan membatasi perempuan dalam peranan ibu dan istri, dan sikap itu merugikan keberadaan perempuan di bidang pimpinan. Yang ketiga, untuk petani perempuan sistem perdagangan agraria dan liberalisasi kebijakan merugikan perempuan petani secara struktural, yang tambah sulit kepada kemampuan perempuan menguasai cara hidup dan pilihan mereka. Ini diakibatkan pasar yang tidak janji, perubahan pembagian pekerjaan dan jenis pekerjaan, dan kesulitan menguasai keseimbangan rumah tangga. Hal bertiga ini berarti kemampuan perempuan menjadi pemimpin dalam organisasi.

Jadi dua bagian EPF yang dibahas dalam penelitian ini saling terkait secara dalam. Perempuan perlu lebih diakui dalam pekerjaan dan dalam sistem pangan yang lebih menguntungkan laki-laki secara struktural, dan pengalaman perempuan dalam pengaruh dari liberalisasi dan perubahan sistem pertanian harus lebih diperhatikan. Keterwakilan perempuan diperlukan untuk mengakui tujuan tersebut, dan hal ini tujuan organisasi LVC dan SPI untuk menimbangkan pengalaman semua petani, bukan laki-laki saja. Untuk keterwakilan setara, pengalaman perempuan dalam perjuangan kedaulatan pangan harus diakui dan dilibatkan dalam wacana untuk keadilan petani pada umumnya.

Akan tetapi, di Indonesia suara perempuan petani perlu dikuatkan untuk melibatkan mereka dalam kepemimpinan, dan kekuasaan ini hanya bisa ditingkatkan dengan peningkatan percaya diri perempuan di akar rumput dan rumah tangga, supaya memang ada perempuan yang ingin bergerak di ruangan publik serta mewakili perempuan. Pada tingkat akar rumput, kalau perempuan tidak menyertai kegiatan dan mengikuti pemikiran kedaulatan pangan, sulit suatu keluarga ikut tanpa dia. Karena ini perempuan dinamakan ‘ibu kedaulatan pangan’ (Prasarja 2011).

6.3 Tantangan LVC dan SPI pada masa depan

Ibu kedaulatan pangan harus dilibatkan dalam organisasi SPI supaya tujuan LVC bisa diterapkan, masih ada tantangan banyak. Sudah 8 tahun sejak Komite Perempuan Internasional memulai perjuangan dalam organisasi LVC untuk kesetaraan gender, dan perjalanannya sulit dan panjang, tetapi berprestasi. Kenyataan keterwakilan perempuan masih jauh, tetapi kerangka pada tingkat internasional itu membuka jalur kesadaran dan kesetaraan pada semua tingkat di bawah. Pada tingkat internasional, sudah keterwakilan cukup banyak dan ada perempuan dan laki-laki yang mewakili setiap daerah di pertemuan internasional. Penerusan perjuangan itu sangat penting untuk pesan menyebarkan ke para penonton lebih luas, dan supaya benar-benar termasuk laki-laki dan perempuan dalam perjuangan untuk kesetaraan gender.

Perempuan petani Indonesia mengalami kerugian besar dalam beberapa hal, termasuk kekerasan melawan perempuan, tetapi pada umumnya keadaannya kesetaraan gender sudah mulai baik. Inti keadaan kesetaraan gender harus dipahami semua pengurus SPI supaya pelaksanaan program perempuan dan upaya untuk mencapai kesetaraan itu. Program SPI yang terkait dengan pembenihan, pimpinan perempuan dan pola makan semua membantu perempuan dengan peningkatan keterwakilan dan pendidikan. Penerapan kesetaraan gender adalah salah satu pilar utama kedaulatan pangan, dan kedaulatan benar tidak bisa dicapai tanpa keterlibatan perempuan, sebagai tulang punggung keluarga, penguasa pangan di rumah tangga dan sebagian besar pekerja pertanian. SPI seharusnya berusaha melibatkan perempuan dalam kepemimpinan lain, bukan saja Departemen Perempuan, karena persoalan perempuan bukan sesuatu yang ada sendirian, tetapi berada di semua bidang. Peningkatan program yang membantu perempuan di dalam ruangan rumah tangga dan keluarga seharusnya dikuatkan supaya perempuan merasa kemampuan mewakili diri mereka terbantahkan. Dukungan dari LVC dan Komite Internasional Perempuan harus tetap meningkatkan kesadaran pengalaman perempuan di tingkat internasional supaya negara anggota

bisa mengerti dan mengalami kesetaraan itu. Suatu tindakan lain yang bisa bantu di SPI adalah pemulaian program kesetaraan gender untuk laki-laki, supaya pengertian mereka ditingkatkan dan perubahan sikap tidak harus diperjuangkan perempuan saja: kalau laki-laki juga mengerti mengapa kesetaraan gender itu penting, menjadi lebih mudah mencapai tujuan dan semua dapat memperoleh keuntungan.

7. Penutup

Penelitian ini memberi jendela kecil untuk mengerti bagaimana pengaruh perubahan pola produksi pangan internasional melalui keadaan di Jawa Tengah pada masa kini, dalam gerakan kedaulatan pangan dan organisasi antarbangsa yang mewakili itu, LVC. Keterwakilan perempuan dalam organisasi LVC berarti kepentingan perempuan dihargai pada tingkat internasional, dan ini dicerminkan di tujuan SPI dan keberadaan perjuangan kuat untuk hak perempuan dan melawan kekerasan melawan perempuan. Untuk mewakili dan berjuang persoalan pertanian dan pangan yang terkait khususnya dengan perempuan, dan untuk memberi pemahaman bagaimana pengalaman perempuan berbeda, itu sangat penting berada perempuan dalam jabatan pengurus organisasi.

Sebagai saran penelitian lebih lanjut, ada keperluan pembahasan berbagai topik penting. Persoalan pembaruan agraria, kesetaraan gender dan kedaulatan pangan adalah tiga topik yang sangat besar. Di negara seperti Indonesia di mana ada ratusan suku, ribuan pulau dan jumlah penduduknya banyak, ketiga topik ini tidak seragam. Salah satu topik yang cukup banyak dibahas tetapi belum dengan perspektif gender adalah pembaruan agraria, dan juga pengaruh keberadaan kantor LVC atau kekuatan SPI dengan perjuangan pembaruan agraria di Indonesia. Itu memang salah satu perjuangan terbesar LVC, dan masalah yang sangat besar di Indonesia. Akses atas tanah ada peranan besar dalam kehidupan sehari-hari perempuan, karena kalau tidak ada tanah, petani tidak bisa menanam, jadi mereka tidak bisa menguasai pembenihan, keputusan atas pupuk dan pestisida kimia, dan lain-lain. Gerakan kedaulatan pangan di Indonesia pada umumnya belum banyak dibahas. Perlawanan dampak dari luar dalam bidang pertanian seharusnya dipetakan di Indonesia, sebagai negara dengan keadaan gerakan petani dan kedaulatan pangan yang kuat. Juga penting supaya bisa kontribusi kepada sastra internasional, karena ada pola persoalan global yang dihadapi kebanyakan petani dan masyarakat umum di dunia yang terkait dengan kekuasaan atas pangan dan perubahan hubungan manusia dengan pangan.

8. Catatan Tambahan

Penelitian ini seharusnya diterapkan di Jawa Barat dan Jateng, sebagai perbandingan. Karena keadaan di luar tercapainya penulis, tidak bisa dilakukan begitu. Namun, yang bisa terlihat adalah bahwa keadaan di Jawa Barat berbeda dengan keadaan di Jateng. SPI ada pengaruh yang baru saja di Jawa Barat, dengan lima kantor di berbagai daerah, dibandingkan dengan Jateng di mana ada sejak pendirian SPI.

Gerakan LVC ada di Jawa Barat sebelum 2007 ketika SPI adalah FSPI. Salah satu serikat petani yang anggota FSPI adalah Serikat Petani Pasundan (SPP), organisasi di Jawa Barat. Seperti sudah disebutkan tadi, waktu FSPI disatukan, semua serikat yang anggota memutuskan menyatukan dengan SPI kecuali SPP di Jawa Barat dan SPJT di Jawa Timur, yang menjadi Aliansi Petani Indonesia (API). SPP mengatakan alasan resminya untuk tidak menyatukan dengan SPI adalah bahwa mereka merasa pendirian organisasi mereka berbeda dengan pendirian SPI, dan mereka mau meneruskan itu di Jawa Barat. Yang kedua adalah bahwa itu keputusan besar untuk menyatukan, khususnya dengan administrasi, karena mereka ada banyak anggota. Meskipun, di bawah permukaan resmi, ada tanda yang menerangkan perasaan yang mungkin lebih dalam; di Konferensi Internasional ke-6 LVC di Jakarta Juni 2013, SPP tidak mengirim perwakilan. Pemimpinnya menghadiri untuk menunjukkan solidaritas, tetapi ini menunjukkan bahwa SPP tidak mendukung SPI tetapi mendukung LVC, dan memunculkan pertanyaan kenapa begitu dan kalau ada tekanan antara tujuan SPI dan LVC untuk aktor-aktor lain. Seharusnya LVC ada sebanyak anggota bisa di Indonesia untuk menyebar dan membagi gerakan kedaulatan pangan, tetapi di akar rumput ada sisi yang lebih rumit di politik lokal. Ini satu contoh kerumitan politik di Indonesia dan memang yang bisa terjadi di dalam gerakan, dan walaupun tidak pasti, untuk memberi gambaran lebih lengkap perlu waktu, sumber daya dan perbatasan kata lebih banyak.

9. Acuan Sumber

Wawancara

Achmad Ya'kub, Ketua Departemen Kajian Strategis dan Koordinator Komite Kebijakan Nasional, & Rachmad, Kebijakan Nasional & Internasional. Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia, Jl. Mampang Perapatan XIV No. 5, Jakarta.

Harsun, Siti. Ketua Perempuan, Buruh Migran dan Anak, Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah, Salatiga, Jateng.

Inayah, Siti. Ketua Departemen Perempuan, Dewan Wilayah Jawa Tengah, Serikat Petani Indonesia.

Pramono, Tejo. Karyawan Umum, Komite Internasional La Via Campesina., Jl. Mampang Perapatan XIV No. 5, Jakarta.

Sunito, Melani & Sunito, Satyawan, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Jl. Kamper, Kampus IPB Darmaga, Bogor.

Pustaka

Armstrong, L. 1994. 'Stories from Sekaralas: Ecofeminism in a Developing Country'. *Canadian Woman Studies*, 17(2):135-138.

Azwar, A. 2004. 'Tubuh sehat ideal dari segi kesehatan'. *Seminar Kesehatan Obesitas*, Senat Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Sabtu, 15 Februari 2004, Depok.

Blumberg, R. L. 1984. 'A General Theory of Gender Stratification.' In *Sociological Theory*, ed. Randall Collins, pp. 23-101. Jossey-Bass, San Francisco.

Borras Jr., S. B. 2010. 'The Politics of Transnational Agrarian Movements'. *Development and Change*, 41(5):771-803.

Burmeister, L. L. & Choi, Y. 2012. 'Food sovereignty movement activism in South Korea: national policy impacts?' *Agriculture and Human Values*, 29:247-258.

Claeys, P. 2012. 'The Creation of New Rights by the Food Sovereignty Movement: The Challenge of Institutionalizing Subversion'. *Sociology*, 46(5):844-860.

Desmarais, A. A. 2008. 'The power of peasants: Reflections on the meaning of La Via Campesina.' *Journal of Peasant Studies*, 24:138-149.

Desmarais, A. A. 2004. 'La Via Campesina: Peasant Women on the Frontiers of Food Sovereignty'. *Canadian Woman Studies*, 23(1):140-145.

- FAO. 2009. 'Global agriculture towards 2050: How to feed the world 2050.' High-level expert forum, 12–13 October 2009. Food and Agriculture Organization (FAO). Rome, Italy.
- Fuglie, K. O. 2010. 'Sources of growth in Indonesian agriculture.' *Journal of Productive Analysis*, 33:225-240.
- La Via Campesina. 2013. 'Perempuan petani agar tak dimarjinalkan'. *Kompas*, Jumat, 7 Juni, 2013, Jakarta.
- La Via Campesina. 2013. "Women of Via Campesina International Manifesto." Declaration at the Fourth Women's Assembly, June 2013, Jakarta, Indonesia. Tersedia di <http://viacampesina.org/en/index.php/main-issues-mainmenu-27/women-mainmenu-39/1450-women-of-via-campesina-international-manifesto> (diakses 13 Oktober 2013).
- La Via Campesina International Commission on Sustainable Peasant Agriculture. 2012. 'From Maputo to Jakarta: 5 Years of Agroecology in La Via Campesina.' La Via Campesina, Jakarta, Indonesia.
- La Via Campesina. 2000. "Bangalore Declaration of the Via Campesina." Declaration at the Third International Conference of the Via Campesina, 3-6 October, Bangalore, India, 2000. Tersedia di <http://www.viacampesina.org/en/index.php/our-conferences-mainmenu-28/3-bangalore-2000-mainmenu-55/420-bangalore-declaration-of-the-via-campesina> (diakses 29 November 2013).
- Lubis, I. dan Polong, J. J. 2013. 'Strengthening Family Farming and Its Challenge in Indonesia' Di *Peasants' Agriculture in Asia*, 191-121, Eds. Houtart, F. dan Tiejun, W. Ruth Casa Editorial, CLASCO, Argentina.
- Martínez-Torres M. E., dan Rosset, P. M. 2010. 'La Via Campesina: the birth and evolution of a transnational social movement.' *The Journal of Peasant Studies*, 37(1):149-175.
- Martínez-Torres M. E., dan Rosset, P. M. 2012. 'Rural social movements and agroecology: context, theory, and process.' *Ecology and Society*, 17(3):17.
- Menser, M. 2008. 'Transnational Participatory Democracy in Action: The Case of La Via Campesina.' *Journal of Social Philosophy*, 39:1, pp. 20-41.
- Patel, R. C. 2012. 'Food Sovereignty: Power, Gender, and the Right to Food.' *PLoS Med*, 9(6): e1001223. doi:10.1371/journal.pmed.1001223
- Prasarja, Hadiedi. 2011. 'Petani Perempuan Ibu Kedaulatan Pangan.' Serikat Petani Indonesia, 23 November 2011, Bogor. Tersedia di: <http://www.spi.or.id/?p=4465> (diakses pada 13 Oktober 2013).

- Purwanti, H. 2013. 'Local to global: How Serikat Petani Indonesia has accelerated the movement for agrarian reform.' *La Via Campesina's Open Book: Celebrating 20 Years of Struggle and Hope*. Jakarta, Indonesia.
- Rocheleau, D., Thomas-Slayter, B., Wangari, E. (Eds.), 1996. 'Feminist Political Ecology.' Routledge, London.
- Rustia, H. N. 2009. 'Pengaruh pajanan pestisida golongan organofosfat terhadap penurunan aktivitas enzim cholinesterase dalam darah petani sayuran penyemprot pestisida. Skripsi, Kesehatan Lingkungan, Universitas Indonesia.
- Sukiyono, K. & Siriwardana, M. 2007. 'Short run impacts of trade liberalisation on the regional economy in Indonesia.' *Australasian Journal of Regional Studies*, 13(1):45-63.
- Susila, W. R. 2010. 'Kebijakan subsidi pupuk: ditinjau kembali.' *Jurnal Litbang Pertanian*, 29(2): 43-49.
- Tarrow, Sidney and Doug McAdam. 2005. 'Scale shift in transnational contention.' In *Transnational protest and global activism*, eds. Donatella della Porta and Sidney Tarrow, 212–147. Lanham, MD: Rowan & Littlefield Publishing Group, Inc.
- Wieringa, S. E. 2001. 'The birth of the New Order state in Indonesia; Sexual politics and nationalism.' Institute of Social Studies Working Paper 332, The Hague, the Netherlands.
- Wolf, D. L. 1988. 'Female Autonomy, the Family, and Industrialization in Java.' *Journal of Family Issues*, 9:85-107.
- World Instant Noodles Association (WINA). 'Expanding Market: global Demand for Instant Noodles'. 2013 Estimate as of 25 April, 2013. Tersedia di: <http://instantnoodles.org/noodles/expanding-market.html>
- Zimmerer, K. S. & Basset, T. J. 2003. 'Political ecology: an integrative approach to geography and environment-development studies'. Guilford Press, New York.